

**KONSTRUKSI SOSIAL DAN BUDAYA DALAM
KEGAGALAN PENERAPAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI
CEDAW (STUDI KASUS: PEMERKOSAAN DAN
PEMBUNUHAN PEREMPUAN KASTA DALIT DI HATHRAS
INDIA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

**PUTRI FADILAH
07041381823171**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**KONSTRUKSI SOSIAL DAN BUDAYA DALAM
KEGAGALAN PENERAPAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI
CEDAW (STUDI KASUS : PEMERKOSAAN DAN
PEMBUNUHAN PEREMPUAN KASTA DALIT DI
HATHRAS INDIA)**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

PUTRI FADILAH

07041381823171

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing Untuk Diajukan Dalam Ujian Akhir
Program Sarjana**

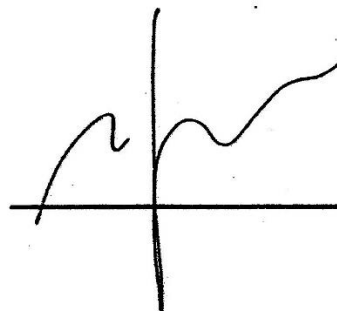
Pembimbing I

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197803022002122002



Pembimbing II

Abdul Halim, S.IP., M.A.
NIP. 19931008202121020



Disetujui oleh,

Ketua Jurusan

Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP. 19650427198903100

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

KONSTRUKSI SOSIAL DAN BUDAYA DALAM KEGAGALAN PENERAPAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI CEDAW (STUDI KASUS : PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN PEREMPUAN KASTA DALIT DI HATHRAS INDIA)

SKRIPSI

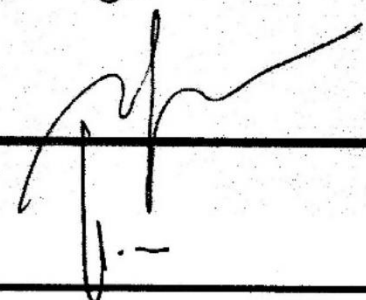
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji pada Tanggal 31 Desember 2021 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
Ketua



Abdul Halim, S.IP., MA
Anggota



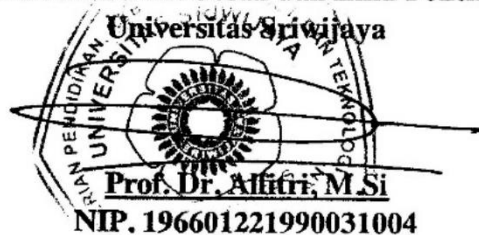
Dr. Ir. H. Abdul Najib, MM
Anggota

Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
Anggota

05/03/2022 

Palembang, 2022

Mengesahkan
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Fadilah

NIM : 07041381823171

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh – sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Konstruksi Sosial dan Budaya Dalam Kegagalan Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi CEDAW (Studi Kasus: Pemerkosaan dan Pembunuhan Perempuan Kasta Dalit di Hathras India” ini adalah benar – benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiasi di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh – sungguh tanpa pemaksaan dari pihak mana pun.

Palembang, 21 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Putri Fadilah

NIM. 07041381823171

ABSTRAK

India merupakan salah satu dari banyak Negara yang meratifikasi CEDAW tepatnya pada 30 Juli 1980 di tandatangani dan di ratifikasi 9 Juli 1993 dengan membuat deklarasi mengenai Konvensi ini. Namun, permasalahan terhadap perempuan di India tidak hanya hadir dari stereotipe dari masyarakat melainkan juga adanya dimensi lain yang lebih menekan keberadaan perempuan yaitu budaya kasta yang masih dipertahankan. Tradisi yang sangat kuat dan kental dalam masyarakat India membentuk praktik sosial dimana masyarakat India yang mayoritas memeluk agama Hindu memiliki hierarki sosial atas gender terutama kepada perempuan dan sistem kasta sosial. Uttar Pradesh menjadi salah satu Negara bagian dengan angka kasus tertinggi dalam kejahatan terhadap kasta rendah. Penelitian kali ini melihat bagaimana faktor konstruksi sosial dan budaya yang mempengaruhi kegagalan India dalam menerapkan prinsip non-diskriminasi CEDAW dengan menganalisis menggunakan konsep konstruktivisme yang melihat bahwa suatu konstruksi sosial dibentuk melalui *rules*, *agents*, dan *speech act*.

Kata Kunci: CEDAW, Dalit, India, Kasta, Perempuan, Konstruktivisme, Uttar Pradesh

Pembimbing I



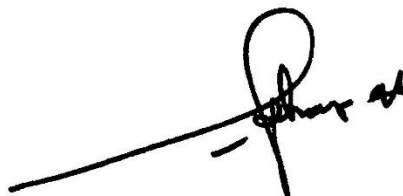
Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002

Pembimbing II



Abdul Halim, S.IP., M.A
NIP. 199310082020121020

Palembang, 21 Desember 2021
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP.196504271989031003

ABSTRAC

India is one of the many countries that have ratified CEDAW, precisely on 30 July 1980, signed and ratified on 9 July 1993 by making a declaration regarding this Convention. However, the problem with women in India does not only arise from the stereotypes of society but also from another dimension that is more pressing for the existence of women, namely the caste culture that is still maintained. A very strong and thick tradition in Indian society forms a social practice in which Indian society, which is predominantly Hindu, has a social hierarchy over gender, especially to women and the social caste system. Uttar Pradesh is one of the states with the highest number of cases of crimes against low castes. This study looks at how social and cultural construction factors influence India's failure to apply the CEDAW non-discrimination principle by analyzing using the concept of constructivism which sees that social construction is formed through rules, agents, and speech acts.

Keywords: CEDAW, Dalit, India, Caste, Women, Constructivism, Uttar Pradesh

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat rahmatnya, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Konstruksi Sosial Dan Budaya Dalam Kegagalan Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Cedaw (Studi Kasus: Pemerkosaan Dan Pembunuhan Perempuan Kasta Dalit Di Hathras India”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini pula tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunannya. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasihnya dengan tulus kepada:

1. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd. dan Bapak Abdul Halim S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dalam pembuatan skripsi serta masukan dalam pembuatan skripsi hingga skripsi ini selesai.
2. Bapak Dr. Ir. H. Abdul Najib, MM dan Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM., M. SC selaku dosen pembahas yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi sehingga lebih baik.
3. Kedua orang tua penulis Ayah dan Ibu yang telah memberikan dukungan, masukan, dorongan, dan semua bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat lulus sebagai sarjana Hubungan Internasional saat ini.
4. Kepada ke tiga kakak yang telah memberikan semua dukungan kepada penulis.
5. Untuk kedua kakak ipar yang tersayang atas dorongan dan dukungan terhadap penulis.

6. Cavalier yang telah menemani penulis sejak awal kuliah sampai sekarang yaitu Nanak, Nanda, dan Ren yang saling membantu dan mendukung satu sama lain yang membuat kehidupan perkuliahan penulis tidak sendirian.
7. Untuk Dini, Yanda, dan Ica yang termasuk GWS Gang yang membuat hari-hari penulis penuh canda-tawa selama masa perkuliahan.
8. Delfie yang setia mendengarkan keluh kesah penulis sedari SMA sampai sekarang dan memberikan dorongan kepada penulis selama ini.
9. Latanya yang menjadi teman penulis sedari awal memulai perkuliahan yang menjadi sahabat penulis sampai sekarang.
10. Utazora terutama kepada Aris, Veelin, Puput, Ara, Rhii, dan Mika yang sudah menemani penulis setiap malam saat menyusun skripsi.
11. Teman-teman UwU Tor, KoMa, Mok, dan Venti menemani Healing Times penulis selama perkuliahan.
12. Semua rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang sudah menemani penulis selama perkuliahan dalam semua waktu bahkan pada saat waktu terendah penulis.
13. NCT, たかやん (Takayan), Lilas Ikuta, Yuuri, dan Taylor Swift yang menghibur dengan lagu-lagu yang menyemangati penulis saat membuat skripsi.
14. NCT Jaehyun dan Nanami Kento sebagai support system kepada penulis saat mengerjakan skripsi.
15. Dan semua pihak lainnya yang turut berperan dalam membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini yang belum bisa penulis sebutkan dalam halaman ini.

Last but not least Thankyou me, you've done well and i'm proud of you for being strong enough to pass this thought. In the future we will have to face another

struggles and another difficulties. Do your best and i hope you will find what you truly happiness on your life.

Penulis meminta maaf atas kekurangan dan kesalahan dikarenakan keterbatasan kemampuan dan masih jauh dari kata sempurna dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pihak dan penulis bersedia menerima kritikan maupun saran yang membangun.

Palembang, 31 Desember 2021

Putri Fadilah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Manfaat Teoritis	7
1.4.2. Manfaat Praktis	8
BAB II.....	9
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Kerangka Konseptual	16
2.2.1. Konstruktivisme	16
2.3. Alur Pemikiran	21
2.4. Argumentasi Utama	22
BAB III	23
3.1. Desain Penelitian.....	23
3.2. Definisi Konsep.....	23
3.3. Fokus Penelitian	25
3.4. Unit Analisis	27
3.5. Jenis dan Sumber Data	27

3.6. Terknik Pengumpulan Data	28
3.7. Teknik Keabsahan Data	28
3.8. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV	31
4.1. Sejarah CEDAW dan Prinsip	31
4.2. Ratifikasi CEDAW oleh India dan Adopsinya	36
4.3. Kondisi Politik	38
4.4. Kornologis Kasus Pemerksaan dan Pembunuhan di Hathras India	41
BAB V	45
5.1. <i>Rules</i>	45
5.1.1. Sistem Hierarki Kasta	45
5.1.2. Patriarki Brahmana.....	48
5.2. <i>Agents</i>	52
5.2.1. Rashtriya Swamyamsevak Sangh (RSS).....	53
5.2.2. Pemerintahan Narendra Modi (BJP)	56
5.2.3. Yogi Adityanath	58
5.3. <i>Speech Act</i>	61
5.4. Skema Konstruktivisme	69
BAB VI	70
6.1. Kesimpulan	70
6.2. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Pemerkosaan dan Percobaan Pemerkosaan Terhadap Perempuan SC/ST (2014-2019).....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Polisi Uttar Pradesh melakukan kremasi terhadap korban pemerkosaan dan pembunuhan di Hathras pada malam hari	42
Gambar 2. 1 CBI tiba untuk menyelidiki kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan Dalit berusia 19 tahun.....	43
Gambar 3. 1 Gambaran dari hierarki kasta berasal dari bagian tubuh Dewa Brahma.....	46
Gambar 4. 1 Kasta Atas Hindu mengadakan Panchayats atau pertemuan dalam rangka mendukung terdakwa dari kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan Dalit di Hathras	67

DAFTAR SINGKATAN

AIDMAM	: <i>All India Dalit Mahila Adhikar Manch</i>
BJP	: <i>Bharatiya Janta Party</i>
CBI	: <i>Central Bureau of Investigation</i>
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
CSW	: <i>Comission on The Status of Women</i>
FIR	: <i>First Information Reports</i>
HYV	: <i>Hindu Yuva Vahini</i>
IPC	: <i>Indian Penal Code</i>
NCRB	: <i>National Crime Record Bureau</i>
OBC	: <i>Other Backward Class</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
POA	: <i>Prevention of Atrocities Act</i>
RSS	: <i>Rashtriya Swamyamsevak Sangh</i>
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
SC	: <i>Scheduled Castes</i>
ST	: <i>Scheduled Tribes</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan berbasis gender merupakan isu yang berawal dari ketidaksetaraan gender, dan merupakan satu dari banyak pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering terjadi didalam masyarakat. Walaupun kekerasan gender tidak terpusatkan kepada salah satu gender saja namun ini terjadi pada perempuan maupun laki-laki mengalami kekerasan berbasis gender, akan tetapi mayoritas yang menjadi korban pada isu ini adalah perempuan. PBB menjelaskan jika kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mengakibatkan konsekuensi fisik, seksual, dan mental secara langsung dan berdampak fatal dalam jangka panjang terhadap korban termasuk kematian (World Health Organization, 2020). Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi akibat ketidaksetaraan gender, namun adanya kebijakan-kebijakan, peraturan, dan norma-norma sosial yang diskriminatif memperkuat terjadinya kekerasan ini (Jahan, 2018).

Didalam Piagam PBB salah satu misi utama dari PBB adalah pemajuan dan perlindungan atas hak asasi manusia (United Nations, 2017). Untuk mencapai tujuan dari misi itu, PBB merancang *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang menjadi acuan dimana hak asasi manusia dilindungi secara universal agar setiap individu diseluruh dunia mendapatkan kehidupan yang layak dan bebas, setara, dan juga bermartabat. UDHR menegaskan jika semua hak asasi terhadap semua individu di dunia ini tidak dapat dicabut dan sama tanpa membedakan latar belakang atau keadaan setiap individu tersebut (Amnesty.org, 2021). Ada beberapa konvensi lainnya menangani hak asasi manusia dan lebih tersepsifikan lagi seperti Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of*

Discrimination Against Women) atau yang lebih dikenal dengan singkatan CEDAW merupakan instrumen hukum internasional eksplisit yang memerlukan penghormatan serta ketaatan terhadap hak asasi perempuan. Konvensi ini menjelaskan hak perempuan bebas dari diskriminasi dan menetapkan prinsip-prinsip untuk melindungi hak perempuan (UNFPA, 2006). Konvensi internasional ini disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 18 Desember 1979 dan berlaku pada 3 September 1981. Saat ini ada 187 Negara anggota PBB telah meratifikasi CEDAW. Konvensi ini dibuat atas tujuan PBB yang mana menegaskan kembali keyakinan pada hak asasi manusia yang mendasar, pada martabat, dan nilai pribadi manusia, pada hak yang sama antara pria dan wanita. CEDAW memiliki 3 (tiga) prinsip utama yaitu kewajiban untuk menghormati (kesetaraan dalam hukum dan kebijakan), kewajiban untuk melindungi (non-diskriminasi), kewajiban memenuhi untuk menjunjung kesetaraan. Dimensi dari ketiga prinsip ini saling berkaitan agar tercapainya kesetaraan (Facio & Morgan, 2011).

CEDAW merupakan salah satu konvensi internasional yang memiliki andil penting dalam membawa perempuan kedalam fokus masalah hak asasi manusia. Berawal dari tujuan PBB yang menegaskan atas hak dasar dari hak asasi manusia, hak yang sama antara pria dan juga perempuan. CEDAW mendeskripsikan makna kesetaraan dan bagaimana kesetaraan yang dijelaskan dapat dicapai. Konvensi ini tidak hanya menjadi undang-undang internasional yang membahas hak-hak perempuan, namun juga termasuk menjadi acuan tindakan atas Negara-Negara untuk menjamin hak-hak perempuan (Nations & United Nations, 2010). Hal ini juga termasuk tanggung jawab atas pemerintah untuk memastikan agar setiap masyarakat ataupun kelompok tidak mendiskriminasi perempuan.

India merupakan salah satu dari banyak Negara yang meratifikasi CEDAW tepatnya pada 30 Juli 1980 di tandatangani dan di ratifikasi 9 Juli 1993 dengan membuat

deklarasi mengenai Konvensi ini. Deklarasi pertama berkaitan dengan Pasal 5(a) tentang Negara harus mematuhi dan memastikan ketentuan ini sesuai dengan kebijakannya untuk tidak ikut campur dalam urusan pribadi komunitas manapun tanpa inisiatif dan persetujuannya. Kedua, Pasal 16(2) Pemerintah Republik India menyatakan bahwa meskipun pada prinsipnya mendukung sepenuhnya prinsip pencatatan wajib perkawinan, tidak praktis di Negara luas seperti India dengan keragaman adat, agama, dan tingkatan literasi (United Nations, 1979a).

Diratifikasinya CEDAW yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dari diskriminasi nyatanya belum cukup untuk menghentikan diskriminasi di masyarakat. Dilansir dari CNN, Setidaknya 239.000 anak perempuan di India yang berusia dibawah dari 5 (lima) tahun meninggal setiap tahunnya akibat dari diskriminasi gender. Ada 2,4 juta anak perempuan meninggal jika dijumlahkan dari angka sebelumnya dalam satu dekade saja, dan jumlah tersebut belum termasuk dengan angka kematian yang terjadi sebelum melahirkan (George, 2018). Ini menunjukkan tidak hanya perempuan yang telah dilahirkan namun diskriminasi ini mengancam agar anak perempuan tidak dilahirkan. Sistem patriarki ini telah berlangsung sejak zaman kuno, norma dan nilai adat yang didominasi oleh laki-laki menyebabkan perempuan tertindas dalam diskriminasi yang kejam. Perempuan ditekan untuk memerankan sebagai Ibu, Istri, anak perempuan, dan menantu perempuan. Perempuan dianggap makhluk yang lemah dan harus bergantung kepada laki-laki sepenuhnya (Sharma, 2015).

Pemerintah tentu sudah memiliki kebijakan untuk melindungi perempuan, contohnya saja *National Policy for The Empowerment of Women* pada tahun 2001 yang dibuat untuk memajukan, mengembangkan dan memberdayakan perempuan. Kebijakan ini termasuk melindungi perempuan atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam

rumah tangga maupun masyarakat. Kebijakan ini pula menyediakan bantuan untuk rehabilitas kepada korban dan penindakan secara efektif kepada pelaku (Ministry Of Women & Child Development India, 2015). Kebijakan ini juga termasuk dari pengadopsian CEDAW kedalam kebijakan India.

Permasalahan terhadap perempuan di India tidak hanya berhenti dari stereotipe dari masyarakat. Namun adanya dimensi lain yang lebih menekan keberadaan perempuan yaitu budaya kasta yang masih dipertahankan. Tradisi yang sangat kuat dan kental dalam masyarakat India membentuk praktik sosial dimana masyarakat India yang mayoritas memeluk agama Hindu memiliki hierarki sosial atas gender terutama kepada perempuan dan sistem kasta sosial brahmana(Chakravarti, 1993a). Sistem kasta Hindu di atur dalam *Manusmriti* atau Hukum Manu dimana mengklarifikasikan menjadi empat bagian yaitu Brahmana, Ksatria, Vaihways dan Sudhra. Sedangkan diluar dari ke empat kasta tersebut disebut “*untouchables*” atau di artikan sebagai kaum tak tersentuh yang dikenal dengan kasta Dalit (Aitchison, 2020). Kasta tersebut ditentukan oleh keturunan, profesi atau pekerjaan berdasarkan gagasan yang mendasari kesucian. Dalam sistem kasta ini ada aturan didalamnya dimana adanya pembatasan interaksi sosial antara kasta yang lebih tinggi dengan kasta yang lebih rendah menjadikann norma sosial yang bersifat diskriminatif (Chaudhry, 2013). Penggunaan istilah ‘Dalit’ dilarang ini dalam konstitusi atau undang-undang apapun oleh Kementerian Dalam Negeri India pada tahun 1982 dan digantikan dengan menggunakan istilah *Scheduled Castes* atau SC, karena dianggap merendahkan kelompok tersebut (MUNSHI, 2018).

Dalam situasi ini sistem kasta yang menindas kasta rendah seperti Dalit atas dominasi kasta tertinggi atau kasta Brahama yang memegang kendali dari sistem sosial akhirnya menempatkan wanita dalam situasi yang sulit. Wanita dalit terpuruk atas ia

seorang perempuan, kemiskinan, dan ketentuan adat yang yang diatur dalam sistem kasta yang mempersulit dalam mengakses pelayanan umum (Nidhi & Wandana, 2015).

Perempuan kasta Dalit, khususnya di pedesaan India rentan menjadi korban kekerasan. Ini dikarenakan sebagian besar tanah, sumber daya, kekuatan sosial, pelayanan, didominasi oleh kasta atas dan menengah. Walaupun terdapat regulasi yang melindungi kasta rendah seperti Dalit dimana ada *Protection on Civil Rights Act* tahun 1955 yang tujuannya untuk menghapus praktik yang bersifat diskriminatif dan memberdayakan masyarakat kasta rendah secara sosial maupun ekonomi atau *Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act* (POA) tahun 1989 untuk mencegah kejahatan dan kekejaman dari diskriminasi terhadap kasta Dalit (Nidhi & Wandana, 2015). Kejahatan terhadap perempuan Dalit seringkali terabaikan dalam bermacam-macam pelanggaran atas hak-hak dasar yang terkandung dalam Konstitusi India, Seperti hak atas kesetaraan (Pasal 14), larangan atas diskriminasi (Pasal 15), dan hak untuk hidup (Pasal 21) (Equalit Now, 2020). Masyarakat mengambil andil dalam menghambat peradilan untuk korban, dengan adanya dewan desa atau *khap panchayats* yang sering kali menggunakan kekuatan sosial, ekonomi, maupun politik untuk menekan dengan ancaman atau intimidasi korban agar tetap bungkam (Equalit Now, 2020). Bungkamnya korban atas kekerasan yang diterima ini dikarenakan ketakutan akan dianggap melakukan pemberontakan terhadap kasta atas. Akibatnya korban tidak dapat dirangkul secara menyeluruh.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Pemerksosaan dan Percobaan Pemerksosaan Terhadap Perempuan SC/ST (2014-2019)

No.	Negara Bagian	<i>Rape of Dalit women under SC/ST (PoA) Act r/w IPC</i>	<i>Attempt to rape of Dalit women under SC/ST (PoA) Act r/w IPC</i>

1	Uttar Pradesh	2.947	231
2	Madhya Pradesh	2.738	21
3	Rajasthan	2.217	204
4	Maharashtra	1.478	0
5	Andhra Pradesh	555	47
6	Haryana	780	57
7	Odisha	807	8
8	Telangana	841	12
9	Kerala	777	13
10	Karnataka	529	10

Sumber: AIDMAM Dalit Women Rise For Justice Status Report 2021

Uttar Pradesh menjadi salah satu Negara bagian dengan angka kasus tertinggi dalam kejahatan terhadap kasta rendah (Biswas, 2020). Dalam sebuah laporan AIDMAM (*All India Dalit Mahila Adhikar Manch*) dimana laporan ini mengutip dari laporan tahunan NCRB (*National Crime Record Bureau*) pada tahun 2014-2019 yang menunjukkan Uttar Pradesh menjadi salah satu Negara bagian dengan tingkat kekerasan terhadap wanita kasta Dalit tertinggi, dengan total kasus pemerkosaan terhadap wanita kasta Dalit di bawah SC/ST PoA.Act r/w IPC (*Indian Penal Code*) 2.947 kasus dan percobaan pemerkosaan yang mencapai 231 kasus (AIDMAM, 2021). Pada tahun 2020 kasus di Uttar Pradesh tepatnya di distrik Hathras terjadi kasus pemerkosaan dan pembunuhan oleh sekelompok laki-laki dari kasta atas terhadap perempuan berkasta Dalit. Kasus ini menjadi satu dari banyak kasus yang menunjukkan ke-kejaman bagaimana wanita kasta Dalit bukan kekerasan seksual biasa khususnya di India. Kasus ini memperlihatkan bagaimana sulitnya korban untuk mendapat keadilan. Bahkan konstitusi India tahun 1950 yang melarang secara hukum diskriminasi kasta, tidak menghentikan diskriminasi dalam sistem kasta

yang masih menyebar. Pemerintah pusat membuat regulasi-regulasi yang mengadopsi prinsip-prinsip CEDAW di dalamnya. Maka dari itu penulis tertarik melihat bagaimana faktor konstruksi sosial dan budaya yang mempengaruhi kegagalan India dalam menerapkan prinsip non-diskriminasi CEDAW dengan menganalisis kasus ini yang memperlihatkan realita seorang wanita Dalit yang menjadi korban kekerasan tidak terlindungi dan sulit mencapai keadilan akibat sistem kasta.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, penelitian ini dirumuskan dalam sebuah pertanyaan penelitian yaitu,

“Bagaimana Konstruksi Sosial dan Budaya Dalam Kegagalan Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi CEDAW (Studi Kasus: Pemerksaan dan Pembunuhan Perempuan Kasta Dalit di Hathras India)”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk “menganalisis konstruksi sosial dan budaya yang menjadi kegagalan dalam penerapan prinsip non-diskriminasi CEDAW dalam kasus pemerksaan dan pembunuhan terhadap perempuan kasta Dalit yang terjadi di Hathras India”. Tujuan dari penelitian ini tidak hanya sebagai salah satu persyaratan kelulusan dari studi S1, tetapi juga sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya tentang penerapan prinsip CEDAW dan diskriminasi atas gender dan kasta. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan gambaran kepada pembaca yang tertarik dengan isu terhadap diskriminasi gender dan kasta melalui sudut pandang hubungan internasional.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan perempuan dan diskriminasi akibat dari konstruksi sosial dan budaya sistem kasta agar dapat dikaji lebih dalam oleh akademisi hubungan internasional.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan penulis dalam penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan untuk setiap aktor negara dan aktor non-negara dalam hubungan internasional dalam tingkatan dari nasional sampai internasional tentang konstruksi sosial dan budaya dalam kegagalan penerapan prinsip non-diskriminasi CEDAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, E. (1997). Seizing the middle ground: Constructivism in world politics. *European Journal of International Relations*, 3(3).
<https://doi.org/10.1177/1354066197003003003>
- AIDMAM. (2021). *Dalit Women Rise For Justice : Status Report 2021*. Retrieved from <http://www.aidmam-ncdhr.org/assets/img/publications/Dalit-Women-Rise-For-Justice-Status-Report-2021.pdf?msg=success>
- Aitchison, A. (2020). In India, Dalits still feel bottom of the caste ladder. Retrieved from NBC News website: <https://www.nbcnews.com/news/world/india-dalits-still-feel-bottom-caste-ladder-n1239846>
- Ali, S. (2020). The Laws of Manu and What They Would Mean for Citizens of the Hindu Rashtra. Retrieved from The wire website: <https://thewire.in/rights/manusmriti-hindu-rashtra-rss>
- Amnesty.org. (2021). Universal Declaration Of Human Rights. Retrieved from Amnesty.org website: <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/universal-declaration-of-human-rights/>
- Artati, Wardhana, D. E. C., & Basuki, R. (2020). Tindak Tutur Ilokusi Asertif, Direktif, Ekspresif, Komisif, dan Deklaratif pada Program Gelar Wicara Mata Najwa. *Diksa Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 43–57.
<https://doi.org/10.33369/diksa.v6i1.9687>
- Balzacq, T. (2010). *Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203868508>
- BBC News. (2019). What is India's caste system? Retrieved from BBC News website: <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-35650616>
- Behraves, M. (2011a). Constructivism: An Introduction. Retrieved from E-INTERNATIONAL RELATIONS website: <https://www.e-ir.info/2011/02/03/constructivism-an-introduction/>
- Behraves, M. (2011b). The Thrust of Wendtian Constructivism. Retrieved from E-INTERNATIONAL RELATIONS website: https://www.e-ir.info/2011/03/09/the-thrust-of-wendtian-constructivism/#_edn64
- Bhartiya Stree Shaki. (2017). *Tackling Violence Against Women: A Study of State Intervention Measures (A comparative study of impact of new laws, crime rate and reporting rate, Change in awareness level)*. New Delhi.

- Biswas, S. (2020). Hathras case: Dalit women are among the most oppressed in the world. Retrieved October 20, 2021, from CNN website: <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-54418513>
- Brueck, L. (2012). At the Intersection of Gender and Caste: Rescripting Rape in Dalit Feminist Narratives. In I. A. Loomba & R. Lukose (Eds.), *South Asian Feminisms*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1515/9780822394990-011>
- Chairani, M. (2018). Hambatan Dalam Implementasi CEDAW di Pakistan: Studi Kasus Honour Killing. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 7, 141–153.
- CHAKRABARTI, A. (2020). BJP IT cell head Amit Malviya tweets video of Hathras victim, experts say it violates IPC. Retrieved November 19, 2021, from The Print website: <https://theprint.in/india/bjp-it-cell-head-amit-malviya-tweets-video-of-hathras-victim-experts-say-it-violates-ipc/515973/>
- Chakravarti, U. (1993a). Conceptualising Brahmanical patriarchy in early India: Gender, caste, class and state. *Economic and Political Weekly*, 28(14). Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/4399556>
- Chakravarti, U. (1993b). Conceptualising Brahmanical Patriarchy in Early India: Gender, Caste, Class and State. *Economic and Political Weekly*, 28(14), 579–585.
- Chaturvedi, H. (2020). Thakur mahapanchayat held in Hathras. Retrieved from The Hindustan Times website: <https://www.hindustantimes.com/india-news/thakur-mahapanchayat-held-in-hathras/story-FbgQWs89QTBGJf3KiX0nbJ.html>
- Chaudhry, P. (2013). Caste as an Institutionalised System of Social Exclusion and Discrimination : Some Evidance. *International Journal of Gender and Women's Studies*, 1, 56–63. <https://doi.org/10.15640/ijgws>
- Dabhade, N. (2019). RSS and women empowerment: A Masquerade. <https://doi.org/https://csss-islam.com/secular-perspective/rss-and-women-empowerment-a-masquerade/>
- DHINGRA, S. (2020). Who are Thakurs of UP and why are they powerful? Answers are key to understanding Hathras. Retrieved from The Print website: <https://theprint.in/india/who-are-thakurs-of-up-and-why-are-they-powerful-answers-are-key-to-understanding-hathras/519418/>
- Diwakar, J. (2020). Sex as a Weapon to Settle Scores against Dalits: A Quotidian Phenomenon. *CASTE: A Global Journal on Social Exclusion*, 1(2), 121–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.26812/caste.v1i2.206>
- Equalit Now. (2020). Dalit Women Speak Out: The movement to end caste based sexual

- violence across India. Retrieved October 21, 2021, from equalitynow.or website:
https://www.equalitynow.org/dalit_women_speak_out_india
- Facio, A., & Morgan, M. I. (2011). Equity or Equality for Women? Understanding CEDAW's Equality Principles. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.1469999>
- Falcon, M. S. (2015). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Retrieved from Encyclopedia Britannica website:
<https://www.britannica.com/event/Convention-on-the-Elimination-of-All-Forms-of-Discrimination-Against-Women%0A>
- Frayar, L., & Khan, F. L. (2019). The Powerful Group Shaping The Rise Of Hindu Nationalism In India. Retrieved from NPR website:
<https://www.npr.org/2019/05/03/706808616/the-powerful-group-shaping-the-rise-of-hindu-nationalism-in-india>
- George, S. (2018). Gender discrimination kills 239,000 girls in India each year, study finds. Retrieved October 20, 2021, from CNN website:
<https://edition.cnn.com/2018/05/15/asia/gender-discrimination-india-deaths-intl/index.html>
- Ghose, D. (2017). Yogi Adityanath's Anti-Romeo Squad in Uttar Pradesh is old wine in new bottle. Retrieved from Firstpost. website: <https://www.firstpost.com/india/yogi-adityanaths-anti-romeo-squad-in-uttar-pradesh-is-old-wine-in-new-bottle-3348178.html>
- Gloria, S., Martinez, I., & Julie, M. (1999). Between Their Stories and our Realities: A Manual for Seminars and Workshops on CEDAW. Retrieved from PDHRE website:
<http://pdhre.org/cedaw/index.html#learning>
- Government of India Ministry of Law and Justice. (2020). *THE CONSTITUTION OF INDIA*. Retrieved from <https://legislative.gov.in/sites/default/files/COI.pdf>
- Govinda, R. (2006). The politics of the marginalised: Dalits and women's activism in India. *Gender & Development, 14*(2), 181–190.
<https://doi.org/10.1080/13552070600747081>
- Guzzini, S. (2000). A reconstruction of constructivism in international relations. *European Journal of International Relations, 6*(2).
<https://doi.org/10.1177/1354066100006002001>
- Hamidi. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*. Retrieved from <http://laser.umm.ac.id/catalog-detail-copy/150002249/%0A>

- Hara, A. E. (2011). *Pengantar analisis politik luar negeri: dari realisme konstruktivisme*. Bandung: Nuansa.
- Harper, E. B. (1964). Ritual Pollution as an Integrator of Caste and Religion. *The Journal of Asian Studies*, 23, 151–197. <https://doi.org/10.2307/2050627>
- Hindustan Times. (2017). Adityanath's 'anti-Romeo' squads will not make UP any safer for women. Retrieved from Hindustan Times website: <https://www.hindustantimes.com/editorials/adityanath-s-anti-romeo-squad-will-not-make-up-any-safer-for-women/story-oIWgg3vE5ALtaWVD1LTxuO.html>
- Hindustan Times. (2020). Hathras cops cremate rape victim by stealth. Retrieved from Hindustan Times website: <https://www.hindustantimes.com/lucknow/hathras-cops-cremate-rape-victim-by-stealth/story-ogo6h0ZJgUYQojsFWv1njJ.html>
- Hudson, V. M., & Vore, C. S. (1995). Foreign policy analysis yesterday, today, and tomorrow. *Mershon International Studies Review*, 39(2). <https://doi.org/10.2307/222751>
- Hurd, I. (2009). *Constructivism: The Oxford Handbook of International Relations* (Duncan Sni). <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199219322.003.0017>
- Jafri, A. A. (2020). NoWages for 22 Months, 650 Mahila Samakhya Workers in UP Threaten Indefinite Stir. Retrieved from News Click website: <https://www.newsclick.in/no-wages-22-months-650-mahila-samakhya-workers-UP-threaten-indefinite-stir>
- Jahan, S. (2018). Violence against women, a cause and consequence of inequality. Retrieved from UNDP website: <https://www.undp.org/blog/violence-against-women-cause-and-consequence-inequality>
- Jean A. Curran, J. (1950). The RSS Militant Hinduism. *Far Eastern Survey*, 19(10), 99–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/3023941>
- Katzenstein, P. J. (2019). Cultural Norms and National Security. In *Cultural Norms and National Security*. <https://doi.org/10.7591/9781501731464>
- Keohane, R. (1989). International institutions and state power : essays in international relations theory. In *Millenium Journal of International Studies* (Vol. 18).
- Kumar, Abhisek. (2020). From delayed FIR to hurried cremation: A timeline of the Hathras case. Retrieved November 18, 2021, from India Today website: After wading through several contradictory claims, India Today has finally pieced together a definitive timeline of the high-profile Hathras gangrape and murder case.

- Kumar, Anuj. (2020). Hathras case | No signs of intercourse, says forensic report. Retrieved from The Hindu website: <https://www.thehindu.com/news/national/hathras-case-forensic-report-confirms-physical-assault-on-victim/article32764938.ece>
- Lakshmi, R. (2015). India's Modi just delivered the world's worst compliment. Retrieved from The Washington Post website: <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/06/08/indias-narendra-modi-meant-to-praise-bangladeshs-female-prime-minister-but-it-was-viewed-as-an-insult-to-all-women/>
- Lisa, S. C. (2020). Kegagalan Penerapan Prinsip CEDAW oleh India dalam Menangani Kasus Dowry Death. *Journal of International Relations*, 6 No.4, 517–524. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/28561/24388>
- Mahaparta, D. (2007). SC Defines What Is a Woman's Modesty. Retrieved from The Times Of India website: <https://timesofindia.indiatimes.com/india/sc-defines-what-is-a-womans-modesty/articleshow/1785567.cms>
- Mahaprashasta, A. A. (2017). Adityanath's 2014 Article Equating Women With Demons Comes Back to Haunt Him. Retrieved from The wire website: <https://thewire.in/gender/adityanath-womens-rights-triple-talaq>
- Maitreya, Y. (2020). A Dalit in the Sangh: Bhanwar Meghwanshi's disillusionment with RSS lays bare agenda of Brahmin colonisation. Retrieved from Firstpost. website: <https://www.firstpost.com/living/a-dalit-in-the-sangh-bhanwar-meghwanshis-disillusionment-with-rss-lays-bare-its-agenda-of-brahmin-colonisation-8140881.html>
- McNamara, K. R. (2001). Social Theory of International Politics . Alexander Wendt . *The Journal of Politics*, 63(3). <https://doi.org/10.1086/jop.63.3.2691745>
- Mehra, M. (2013). India's CEDAW story. In A. Hellum & A. S. Henriette (Eds.), *Women's Human Rights: CEDAW in International* (pp. 385–409). <https://doi.org/10.1017/CBO9781139540841.018>
- Mickevičienė, D. (2003). Concept of Purity in the Studies of the Indian Caste System. *Acta Orientalia Vilnensia*, 4, 239–254. <https://doi.org/10.15388/AOV.2003.18279>
- Ministry Of Women & Child Development India. (2015). NATIONAL POLICY FOR THE EMPOWERMENT OF WOMEN (2001). Retrieved from Ministry Of Women & Child Development India website: <https://wcd.nic.in/womendevlopment/national-policy-women-empowerment>
- MUNSHI, S. (2018). Is Dalit an Offensive Word? Identity for Some, Others Say Use of SC/ST Will Mask Atrocities. Retrieved from news18 website: <https://www.news18.com/news/india/is-dalit-an-offensive-word-identity-for-some->

others-say-use-of-scst-will-mask-atrocities-1867585.html

- Napikoski, L. (2019). A Brief History of CEDAW : Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Retrieved from ThoughtCo. website: <https://www.thoughtco.com/brief-history-of-cedaw-3529470>
- Nations, U., & United Nations. (2010). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: Concluding observations of the committee on the elimination of discrimination against women. *United Nations*, 58191(February).
- Navsarjan Trust, FEDO, International Dalit Solidarity, & Network. (2013). *The Situation of Dalit Rural Women*. Retrieved from <https://www.ohchr.org/documents/hrbodies/cedaw/ruralwomen/fedonavsarjantrustids.pdf>
- NDTV. (2017). Yogi Adityanath “Belittled Women” In Article, Should Apologise: Congress. Retrieved from NDTV website: <https://www.ndtv.com/india-news/yogi-adityanath-belittled-women-in-article-should-apologise-congress-1682656>
- NDTV. (2019). Controversy Erupts Over BJP Leader’s Offensive Remarks On Mayawati: LIVE Updates. Retrieved from NDTV website: <https://www.ndtv.com/india-news/lok-sabha-elections-2019-controversy-erupts-over-sadhana-singhs-offensive-remarks-on-mayawati-1980361>
- Nidhi, S. S., & Wandana, S. (2015). Dalit Women in India: At the Crossroads of Gender, Class, and Caste. *Women’s Bodies and Global Poverty Eradication*, 8(Women’s Bodies Glob. Poverty Erad.), 45–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.21248/gjn.8.1.54>
- Ojha, A., & Sharma, M. (2020). Hathras case: Accused was frustrated after victim ignored him, says CBI charge sheet. Retrieved from India Today website: <https://www.indiatoday.in/india/story/hathras-case-accused-was-frustrated-after-victim-ignored-him-says-cbi-charge-sheet-1751746-2020-12-21>
- Onuf, N. G. (2012). World of our making: Rules and rule in social theory and international relations. In *World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations*. <https://doi.org/10.4324/9780203722428>
- Onuf, N. G. (2013). Making sense, making worlds: Constructivism in social theory and international relations. In *Making Sense, Making Worlds: Constructivism in Social Theory and International Relations*. <https://doi.org/10.4324/9780203096710>
- Onuf, N., & Katzenstein, P. J. (1998). The New Culture of Security Studies The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. *Mershon International Studies Review*, 42(1).

- Pandey, G. (2021). Hathras rape case: Prisoners in their own home, lives on hold, a village divided. Retrieved from BBC News website: <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-58706861>
- PLD. (2012). *DEVELOPING CAPACITIES STRENGTHENING THE APPLICATION OF CEDAW : A TRAINERS' GUIDE*. Retrieved from <http://cedawsouthasia.org/wp-content/uploads/2012/09/PLD-CEDAW-Trainers-Guide1.pdf>
- Press trust of India. (2022). Hindu Yuva Vahini Gets Active Again To Campaign For Its Founder Yogi Adityanath. Retrieved from NDTV website: <https://www.ndtv.com/india-news/hindu-yuva-vahini-gets-active-again-to-campaign-for-its-founder-yogi-adityanath-2735521>
- RAVI, N. (2020). What Happened in Hathras Case When You Weren't Looking. Retrieved from The Leaflet website: <https://www.theleaflet.in/what-happened-in-hathras-case-when-you-werent-looking/>
- Roy, D. D. (2020). CBI Takes Over Hathras Probe From UP Police. Retrieved November 19, 2021, from NDTV.com website: <https://www.ndtv.com/india-news/cbi-takes-over-probe-into-hathras-case-from-up-police-2308230>
- S.Vijay, K. (2020). Hathras gang rape case | CBI removes FIR from website. Retrieved November 19, 2021, from The Hindus website: <https://www.thehindu.com/news/national/hathras-gang-rape-case-cbi-removes-fir-from-website/article32826796.ece>
- Safi, M. (2017). Controversial Hindu priest chosen as Uttar Pradesh chief minister. Retrieved from The Guardian website: <https://www.theguardian.com/world/2017/mar/19/uttar-pradesh-yogi-adityanath-hindu-priest-chief-minister>
- Sankaran, S., Sekerdej, M., & Hecker, U. von. (2017). The Role of Indian Caste Identity and Caste Inconsistent Norms on Status Representation. *Front in Psychology*, 8, 487. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00487>
- Savakar, V. (2000). *Women in Manusmriti' in Savarkar Samagar (collection of Savarkar's writings in Hindi)*. New Delhi: Prabhat Prakashan.
- Sengar, M. S., Shukla, S., & Ghosh, D. (2020). Thakur Men's Threats On Camera As They Defend Accused in Hathras Horror. Retrieved from NDTV website: <https://www.ndtv.com/india-news/thakur-men-threats-on-camera-as-they-defend-accused-in-hathras-horror-2305341>
- Sengar, S. (2021). "Buffaloes, Bulls Or Women", Everyone Is Safe In Today's Uttar Pradesh, Says CM Yogi Adityanath. Retrieved from India Times website:

<https://www.indiatimes.com/news/india/buffaloes-bulls-or-women-everyone-is-safe-in-todays-uttar-pradesh-says-cm-yogi-adityanath-549409.html>

Shah, A. (2007). Purity, Impurity, Untouchability: Then and Now. *AM Shah*, 56(3), 355–367. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/23620634>

Sharma, I. (2015). Violence against women: Where are the solutions? *Indian Journal Of Psychiatry*, 2, 131–139. <https://doi.org/10.4103/0019-5545.158133>

Singarimbun, M., & Efendi, S. (1989). Metode Penelitian Survei. In *LP3ES*.

Spears, D., & Thorat, A. (2015). Caste, purity, and pollution and the puzzle of open defecation in India: Evidence from a novel measure in a nationally-representative survey. *Economic Development and Cultural Change*, 67(4). <https://doi.org/10.1086/698852>

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta,.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta,.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. In *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.

Tamil Nadu Women's Forum. (2007). *Unheard Voices -DALIT WOMEN An alternative report for the 15th – 19th periodic report on India submitted by the Government of Republic of India for the 70th session of Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Geneva, Switzerland*. Retrieved from https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/SharedDocuments/Ind/INT_CERD_NGO_Ind_70_9030_E.pdf

The Hindu Businessline. (2015). Modi: Small enterprises should focus on branding, packaging. Retrieved from The Hindu Businessline website: <https://www.thehindubusinessline.com/economy/modi-small-enterprises-should-focus-on-branding-packaging/article7081398.ece>

The Quint. (2019). BJP MLA Regrets 'Eunuch' Remark on Mayawati, Complaint Lodged. Retrieved from The Quint website: <https://www.thequint.com/news/india/bjp-leader-sadhna-singh-mayawati-eunuch-opposition#read-more>

Tiwari, S. (2020). Dalit Women Face Brunt of Caste Battles, State Neglect. Retrieved from IndiaSpend website: <https://www.indiaspend.com/dalit-women-face-brunt-of-caste-battles-state-neglect/>

UN Women. (2010). National Policy on the Empowerment of Women. Retrieved

November 18, 2021, from UN Women website: <https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/asia/india/2001/national-policy-on-the-empowerment-of-women-2001>

UNFPA. (2006). The Human Rights of Women. Retrieved from UNFPA website: <https://www.unfpa.org/resources/human-rights-women>

United Nations. (1979a). CHAPTER IV : HUMAN RIGHTS (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women). Retrieved October 19, 2021, from United Nations website: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en#EndDec

United Nations. (1979b). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979. Retrieved from United Nations Human Rights website: <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf>

United Nations. (2017). Protect Human Rights. Retrieved from United Nations website: <https://www.un.org/en/our-work/protect-human-rights>

Virmani, P. (2014). Sexual violence in India is a patriarchal backlash that must be stopped. Retrieved from The Guardian website: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jun/17/sexual-violence-india-patriarchal-narendra-modi-women-reform-rape>

Vishwanath, J., & Palakonda, S. C. (2011). Patriarchal Ideology of Honour and Honour Crimes in India. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 6, 386–395. Retrieved from <https://www.semanticscholar.org/paper/Patriarchal-Ideology-of-Honour-and-Honour-Crimes-in-Vishwanath-Palakonda/7302054d5d4a0c7c438a4a242b65c05f748d35ac>

World Health Organization. (2020). Violence Against Women. Retrieved from World Health Organization website: https://www.who.int/health-topics/violence-against-women#tab=tab_1

Young, O. R. (1986). International Regimes: Toward a New Theory of Institutions. *World Politics*, 39(1). <https://doi.org/10.2307/2010300>

Zehfuss, M. (2002). *Constructivism in International Relations : The Politics of Reality*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9780511491795>